



Penguatan Nilai-Nilai Perdamaian Pasca-Konflik melalui Dialog Sipil: Refleksi dari Kegiatan FGD LAKASPIA di Aceh

*** Halik Halik¹, Muhammad Sahlan², Ilul Nisa³, Nora Saphira⁴,
Naizatul Humaira⁵, Nurfadillah Nurfadillah⁶, Latifah Tudini⁷**

^{1,3,4,5,6,7}Universitas Jabal Ghafur, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Indoensia

**Email: halik@unigha.ac.id*

Abstract

This community service activity took the form of a Focus Group Discussion (FGD) organized by the Aceh Institute for Peace Studies, Advocacy, and Strategy (LAKASPIA) at The Pade Hotel, Banda Aceh. The primary objective was to strengthen the commitment of civil society actors in maintaining sustainable peace following the Helsinki MoU. Through cross-sectoral discussions involving academics, activists, community leaders, and government representatives, the FGD explored reflections on the achievements and challenges of peacebuilding in Aceh, including issues of ex-combatant transformation, social justice, and public policy reform. The results of the activity revealed an urgent need to reinforce transitional justice, civil society participation, and inclusive governance. This initiative underscored the importance of peace education and social consolidation as key instruments in sustaining post-conflict stability.

Keywords: Sustainable Peace, Helsinki MoU, Transitional Justice, Reconciliation, Civil Society.

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian, Advokasi, dan Strategi Perdamaian Aceh (LAKASPIA) di The Pade Hotel, Banda Aceh. Tujuannya adalah memperkuat komitmen aktor sipil dalam menjaga perdamaian berkelanjutan pasca MoU Helsinki. Melalui diskusi lintas sektor yang melibatkan akademisi, aktivis, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemerintah, FGD ini menggali refleksi atas capaian dan tantangan perdamaian di Aceh, termasuk isu transformasi eks-kombatan, keadilan sosial, dan reformasi kebijakan publik. Hasil kegiatan menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat keadilan transisional, partisipasi masyarakat sipil, dan tata kelola pemerintahan yang inklusif. Kegiatan ini menegaskan pentingnya pendidikan perdamaian dan konsolidasi sosial sebagai instrumen utama menjaga stabilitas pasca konflik.

Kata Kunci: Perdamaian Berkelanjutan, MoU Helsinki, Keadilan Transisional, Rekonsiliasi, Masyarakat Sipil.



A. PENDAHULUAN

Perdamaian Aceh pasca penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki* pada 15 Agustus 2005 menjadi tonggak penting dalam sejarah penyelesaian konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia (Supriadi et al., 2022). Kesepakatan tersebut tidak hanya mengakhiri konflik bersenjata yang berlangsung lebih dari tiga dekade, tetapi juga membuka ruang baru bagi rekonsiliasi, pembangunan, dan penguatan institusi sosial-politik di Aceh. Namun demikian, setelah hampir dua dekade, perdamaian yang terwujud masih tergolong sebagai *fragile peace* yakni kondisi damai secara fisik, tetapi masih rentan secara struktural, sosial, dan politik.

Berbagai persoalan pasca-konflik masih menjadi tantangan bagi keberlanjutan perdamaian, antara lain ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, serta terbatasnya partisipasi masyarakat sipil dalam proses pengambilan kebijakan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa perdamaian tidak dapat dipertahankan hanya melalui kesepakatan politik, tetapi memerlukan penguatan nilai-nilai perdamaian di tingkat masyarakat.

Sebagai upaya memperkuat komitmen masyarakat sipil dalam menjaga perdamaian berkelanjutan, Lembaga Kajian, Advokasi, dan Strategi Perdamaian Aceh (LAKASPIA) menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “*Pembangunan Perdamaian di Aceh Pasca MoU Helsinki*”. Kegiatan ini menjadi ruang dialog sipil yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan termasuk akademisi, aktivis, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemerintah untuk merefleksikan capaian, tantangan, dan arah pembangunan perdamaian di Aceh (Fahry & Fuadi, 2020). Melalui dialog lintas sektor ini, penguatan nilai-nilai perdamaian diharapkan dapat terwujud secara lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dengan metode utama Focus Group Discussion (FGD) sebagai wadah dialog sipil antar pemangku kepentingan (Afiyanti, 2008). Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu memfasilitasi pertukaran gagasan, pengalaman, serta refleksi kritis secara setara antara peserta yang berasal dari berbagai latar belakang sosial, akademik, dan institusional. Kegiatan FGD diselenggarakan oleh Lembaga Kajian, Advokasi, dan Strategi Perdamaian Aceh (LAKASPIA) pada tanggal 11 Januari 2023 di The Pade Hotel, Banda Aceh, dengan melibatkan beragam unsur seperti akademisi, aktivis lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, perwakilan komunitas lokal, serta pejabat pemerintah daerah. Keterlibatan lintas sektor ini bertujuan untuk menciptakan ruang dialog yang inklusif dan representatif dalam membahas isu-isu strategis perdamaian pasca-konflik di Aceh.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) persiapan, yang mencakup penyusunan tema, pemetaan isu strategis perdamaian, identifikasi peserta, dan koordinasi dengan pihak terkait; (2) pelaksanaan FGD, berupa diskusi terarah yang dipandu oleh moderator dan menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi, aktivis, serta tokoh masyarakat untuk membahas capaian, tantangan, dan peluang penguatan perdamaian berkelanjutan di Aceh; serta (3) dokumentasi dan refleksi hasil, di mana seluruh proses



diskusi didokumentasikan dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif guna merumuskan poin-poin penting, rekomendasi, serta pembelajaran strategis. Analisis ini menitikberatkan pada interpretasi makna, persepsi, dan pengalaman peserta, yang kemudian digunakan untuk menarik refleksi kritis mengenai kondisi perdamaian di Aceh serta strategi penguatan peran masyarakat sipil dalam tata kelola perdamaian yang inklusif dan berkeadilan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian, Advokasi, dan Strategi Perdamaian Aceh (LAKASPIA) berhasil menjadi ruang dialog produktif bagi para aktor sipil dalam merefleksikan capaian dan tantangan perdamaian Aceh pasca penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki. Melalui diskusi yang melibatkan akademisi, aktivis, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemerintah, kegiatan ini menghasilkan sejumlah temuan penting yang menggambarkan kondisi aktual serta arah pembangunan perdamaian di Aceh.

1. Penguatan Komitmen terhadap Perdamaian Berkelanjutan

Para peserta menilai bahwa perdamaian di Aceh merupakan hasil perjuangan panjang yang harus terus dijaga melalui penguatan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan kebersamaan. Meskipun tidak lagi terjadi kekerasan fisik, beberapa peserta mengidentifikasi adanya potensi kerentanan sosial dan politik yang dapat mengancam stabilitas, seperti ketimpangan ekonomi antarwilayah, kesenjangan akses terhadap sumber daya, dan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik. Oleh karena itu, dialog sipil dianggap penting sebagai sarana memperkuat kesadaran kolektif dan memperbarui komitmen bersama terhadap perdamaian berkelanjutan.

2. Tantangan Keadilan Transisional dan Inklusivitas Kebijakan Publik

Isu keadilan transisional menjadi salah satu topik utama dalam diskusi. Para peserta menyoroti belum optimalnya implementasi prinsip-prinsip keadilan bagi korban konflik, serta masih minimnya ruang partisipasi masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan publik yang berkaitan dengan pembangunan pasca-konflik. Hal ini menunjukkan perlunya mekanisme kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan (Marilang, 2018), agar proses perdamaian tidak hanya bersifat simbolik tetapi benar-benar menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat.

3. Peran Dialog Sipil sebagai Instrumen Rekonsiliasi dan Edukasi Perdamaian

Kegiatan FGD membuktikan bahwa dialog sipil merupakan instrumen efektif untuk memperkuat hubungan antaraktor sosial dan membangun rasa saling percaya (*social trust*) (Bargsted et al., 2023). Melalui proses diskusi terbuka, peserta saling berbagi pengalaman dan perspektif tentang upaya menjaga perdamaian di lingkungan masing-masing. Selain berfungsi sebagai sarana komunikasi lintas sektor, dialog sipil juga berperan sebagai media edukasi perdamaian yang menumbuhkan kesadaran kritis tentang pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal proses rekonsiliasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.



4. Rekomendasi Strategis Penguatan Perdamaian di Aceh

Berdasarkan hasil refleksi bersama, peserta FGD merekomendasikan beberapa langkah strategis, antara lain:

- Mendorong penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam advokasi dan pemantauan kebijakan publik.
- Meningkatkan pendidikan dan literasi perdamaian melalui lembaga pendidikan, media, dan komunitas lokal.
- Memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan akademisi dalam merumuskan program pembangunan pasca-konflik.
- Menyusun mekanisme partisipatif yang menjamin keterlibatan kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan publik.

Secara keseluruhan, kegiatan FGD LAKASPIA menunjukkan bahwa penguatan nilai-nilai perdamaian di Aceh tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan aktif masyarakat sipil. Dialog sipil terbukti menjadi wadah reflektif sekaligus transformatif dalam membangun perdamaian yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

D. DOKUMENTASI





E. KESIMPULAN

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan oleh Lembaga Kajian, Advokasi, dan Strategi Perdamaian Aceh (LAKASPIA) berhasil menjadi ruang dialog sipil yang konstruktif dalam memperkuat nilai-nilai perdamaian pasca-konflik di Aceh. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa meskipun Aceh telah menikmati kondisi damai selama hampir dua dekade setelah penandatanganan MoU Helsinki, perdamaian tersebut masih tergolong rapuh secara sosial dan struktural. Melalui pendekatan dialog lintas sektor yang melibatkan akademisi, aktivis, tokoh masyarakat, dan pemerintah, kegiatan ini berhasil mengidentifikasi sejumlah tantangan utama, antara lain lemahnya implementasi keadilan transisional, terbatasnya partisipasi publik dalam kebijakan, serta masih adanya ketimpangan sosial-ekonomi. Dialog sipil terbukti efektif sebagai sarana reflektif dan kolaboratif untuk memperkuat kesadaran bersama, membangun kepercayaan sosial (social trust), serta meneguhkan komitmen masyarakat terhadap perdamaian berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada: (1) LAKASPIA sebagai penyelenggara kegiatan, (2) para narasumber dan peserta FGD, (3) The Pade Hotel Banda Aceh atas dukungan fasilitas, serta (4) seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam memperkuat perdamaian Aceh yang berkeadilan dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyanti, Y. (2008). Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus) sebagai Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(1), 58–62. <https://doi.org/10.7454/jki.v12i1.201>
- Bargsted, M., Ortiz, C., Cáceres, I., & Somma, N. M. (2023). Social and Political Trust in a Low Trust Society. *Political Behavior*, 45(4), 1401–1420. <https://doi.org/10.1007/s11109-021-09762-2>
- Fahry, M., & Fuadi, A. (2020). Efektivitas Crisis Management Initiative (CMI) Dalam Upaya Membangun Perdamaian Pasca Memorandum Of Understanding (MoU) Helsinki Di Aceh. *Global Political Studies Journal*, 4(2), 89–104. <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v4i2.5876>
- Marilang, M. (2018). REKONSTRUKSI EPISTEMOLOGI TEORI KEADILAN JOHN RAWLS. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 1(1), 41–56. <https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.50>
- Supriadi, S., Nirzalin, N., & Mursyidin, M. (2022). Peran dan Gagasan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Resolusi Konflik Aceh. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSai)*, 3(3), 201–214. <https://doi.org/10.22373/jsai.v3i3.2052>